

E-GOVERNMENT

(KONSEP, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI E-GOVERNMENT DI INDONESIA)



Sadar, S.IP., M.IP

E-GOVERNMENT

(KONSEP, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI E-GOVERNMENT DI INDONESIA)

Sadar, S.IP., M.IP



E-GOVERNMENT
(KONSEP, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI *E-GOVERNMENT* DI INDONESIA)

Penulis:
Sadar, S.IP., M.IP

Desain Cover:
Fawwaz Abyan

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
Andi Setiawan

ISBN:
978-623-459-763-9

Cetakan Pertama:
Oktober, 2023

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)
Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang *E-Government* (Konsep, Implementasi Dan Evaluasi *E-Government* Di Indonesia) telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan *E-Government* (Konsep, Implementasi Dan Evaluasi *E-Government* Di Indonesia).

Buku ini merupakan salah satu wujud perhatian penulis terhadap *E-Government* (Konsep, Implementasi Dan Evaluasi *E-Government* Di Indonesia). Menghadapi tantangan global terutama pada dewasa ini yaitu era industri 4.0, menjadikan setiap lembaga baik lembaga pemerintah ataupun lembaga swasta harus mengadopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebab jika tidak maka tentu akan tertinggal jauh ke belakang. Difusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Internet sangat memberikan berbagai kemudahan dan kenyamanan dalam berbagai konteks misalnya pada bidang perdagangan, bidang pendidikan, bidang sosial, dan lain-lain.

Kesuksesan TIK dan Internet yang mampu merubah proses bisnis dalam konteks perdagangan (komersial) seperti *e-commerce* menjadi lebih efektif dan efisien, ternyata sudah meningkatkan ekspektasi masyarakat karena TIK juga dapat diadopsi oleh pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang efektif dan efisien pula. Secara umum, *e-Government* didefinisikan sebagai pemanfaatan TIK dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, atau pemerintahan yang berbasis elektronik. Dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pemerintah. *E-Government* sebagai “penggunaan TIK oleh institusi pemerintah (seperti WAN, internet, mobile computing) yang memiliki kemampuan untuk mengubah hubungan dengan masyarakat, bisnis, dan pihak yang terkait dengan pemerintah”.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami

untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Oktober, 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 KONSEP, IMPLEMENTASI & PERKEMBANGAN	
<i>E-GOVERNMENT</i> DI INDONESIA	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Konsep dan Definisi	3
C. Implementasi <i>E-Government</i>	6
BAB 2 MODEL TAHAPAN PENGEMBANGAN <i>E-GOVERNMENT</i>	11
A. Pendahuluan.....	11
B. Model Tahapan Pengembangan <i>E-Government</i>	11
BAB 3 PENGEMBANGAN <i>E-GOVERNMENT</i>: PELUANG DAN TANTANGAN	19
A. Pendahuluan.....	19
B. Pengertian Teknologi Informasi	20
C. Pengertian <i>E-Government</i>	22
D. <i>E-Government</i> dan <i>Good Governance</i>	26
E. Peluang dan Tantangan Pengembangan <i>E-Government</i>	29
BAB 4 ELEMEN SUKSES DALAM PENGEMBANGAN <i>E-GOVERNMENT</i>	37
A. Pendahuluan.....	37
B. <i>Support</i> (Dukungan).....	43
C. <i>Capacity</i> (Kapasitas).....	44
D. <i>Value</i>	46
E. Langkah Cerdas Mewujudkan <i>Good Governance</i> Yang Efektif.....	46
F. Faktor-Faktor Sukses Implementasi <i>E-Government</i>	49
BAB 5 PARTISIPASI PUBLIK: STRATEGI DAN INOVASI (<i>E-PARTICIPATION</i>)	51
A. Pendahuluan.....	51
B. Strategi Dalam Konsep Partisipasi	52
C. Konsep Partisipasi.....	53
D. Derajat Partisipasi.....	55
E. Implementasi Partisipasi	56
F. Indikator Partisipasi.....	57
G. Transparansi dan Partisipasi.....	57
H. Inovasi Sebagai <i>E-Participation</i>	60
BAB 6 <i>OPEN GOVERNMENT</i> DAN <i>OPEN DATA</i>	63
A. Pendahuluan.....	63
B. Pengertian <i>Open Government</i>	64
C. Prinsip <i>Open Government</i>	65

D. Pengertian <i>Open Data</i>	67
E. Prinsip <i>Open Government Data</i>	68
F. Implementasi <i>Open Government</i> di Indonesia	69
G. Landasan Hukum <i>Open Government</i> di Indonesia	71
H. Pelaksanaan <i>Open Government</i> di Indonesia	72
BAB 7 SMART GOVERNMENT: TREN E-GOVERNMENT MASA DEPAN	75
A. Pendahuluan	75
B. <i>Smart Government</i> dan Konsepnya	76
C. <i>Trend E-Government</i> Masa Depan	79
DAFTAR PUSTAKA	82
PROFIL PENULIS	90



KONSEP, IMPLEMENTASI & PERKEMBANGAN *E-GOVERNMENT* DI INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Menghadapi tantangan global terutama pada dewasa ini yaitu era industri 4.0, menjadikan setiap lembaga baik lembaga pemerintah ataupun lembaga swasta harus mengadopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebab jika tidak maka tentu akan tertinggal jauh ke belakang. Difusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Internet sangat memberikan berbagai kemudahan dan kenyamanan dalam berbagai konteks misalnya pada bidang perdagangan, bidang pendidikan, bidang sosial, dan lain-lain. Kesuksesan TIK dan Internet yang mampu merubah proses bisnis dalam konteks perdagangan (komersial) seperti e-commerce menjadi lebih efektif dan efisien, ternyata sudah meningkatkan ekspektasi masyarakat karena TIK juga dapat diadopsi oleh pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang efektif dan efisien pula (Ebrahim and Irani, 2005).

Hasil studi menunjukkan bahwa 60% dari warga percaya bahwa penggunaan elektronik dalam pemerintahan atau yang dikenal dengan istilah *e-Government* akan mampu meningkatkan kualitas layanan. Studi tersebut dilaksanakan oleh (James, 2000) yang menyajikan bahwa warga masyarakat ingin segala bentuk layanan terutama pelayanan perpajakan, perizinan, pajak kendaraan bermotor, layanan kesehatan dan lainnya bisa disediakan atau dapat diakses melalui internet. Tidak hanya itu, sekitar 50% warga juga



MODEL TAHAPAN PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT*

A. PENDAHULUAN

“Revolusi Industri” semakin memainkan perannya dalam mengubah total perkembangan teknologi sebuah negara dan kembali melanjutkan program pemerintah bertajuk *E-Government* yang sudah diprogramkan sejak tahun 2000 tujuannya untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan pemanfaatan TIK (Muftikhali and Susanto, 2017). Dalam implementasinya, terdapat beberapa model tahapan pengembangan yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan terciptanya pemerintahan elektronik, tata kelola internet, pemerintahan digital, pemerintahan *online* dan pemerintahan terkoneksi sehingga masyarakat luas dapat memperoleh informasi dengan cepat.

B. MODEL TAHAPAN PENGEMBANGAN *E- GOVERNMENT*

Dalam tahapan pengembangan *E-Government*, terdapat 5 model yang digunakan (Muftikhali and Susanto, 2017):

1. *Capability Maturity Models*

Model *Capability Maturity* proses merupakan kategori model terbaik untuk melakukan pembahasan terkait materi dari setiap uraian dan dapat menarik kesimpulan yang baik dan sederhana.



PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT: PELUANG DAN TANTANGAN

A. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kini telah merambah ke sendi-sendi kehidupan manusia di berbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik, maupun sektor pemerintahan. Mungkin saat ini hampir dapat dipastikan tidak ada bidang yang tidak menerapkan teknologi informasi. Saking pentingnya dan pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini, Indrajit (2011) berpendapat bahwa pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dunia memasuki era baru lebih cepat dari sebelumnya. Pendapat Indrajit ini bisa diterima dengan akal sehat mengingat kebutuhan akan data, informasi dan pelayanan bagi pihak-pihak yang menginginkan kecepatan dan ketepatan membuat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat.

Era teknologi informasi yang disebut juga dengan era informasi dilengkapi dengan perkembangan perangkat keras dan perangkat lunak yang semakin canggih, menjadikan pelayanan kepada masyarakat semakin baik yaitu masyarakat dapat memperoleh data dan informasi dengan kecepatan yang cepat tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar dan waktu yang banyak untuk tiba ke kantor-kantor pemerintah. Kecanggihan teknologi informasi ini tentunya memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari kebutuhan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi,



ELEMEN SUKSES DALAM PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT*

A. PENDAHULUAN

Kebanyakan pemerintahan modern saat ini telah memanfaatkan teknologi untuk menjalankan roda pemerintahan. Tata pemerintahan yang baik dapat menerapkan konsep pemerintahan yang bersih, transparan, amanah, demokratis, dan efektif. Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, saat ini perlu dikembangkan *e-Government*. Hal ini dilakukan demi tercapainya pelayanan publik yang berkualitas dan dapat terselenggara dengan cepat, bersih, efisien, dan ekonomis. Namun untuk mencapai semua itu tidaklah mudah. Hal ini memerlukan kerja sama dari tiga pihak yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kekuasaan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan sendiri. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh beberapa daerah, mereka mulai kreatif dan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara mandiri, mereka bercita-cita mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, peningkatan pemberdayaan masyarakat dan sejenisnya. Hal inilah yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing suatu daerah. Hal ini semakin didukung dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan pemerintah menekankan agar



PARTISIPASI PUBLIK: STRATEGI DAN INOVASI (*E-PARTICIPATION*)

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, tentunya masyarakat harus berpartisipasi aktif di dalamnya. Hal ini menjadi tolak ukur utama dalam proses reformasi dan demokratisasi, sehingga Indonesia berhasil mencapai perubahan di berbagai bidang, baik ekonomi, sosial, hukum, dan politik. Sebagai *voluntary* dan *mandatory* untuk masyarakat yang berpartisipasi, ditentukan oleh derajat demokratisasi suatu negara dan derajat pemahaman terhadap status dan hak-hak yang terkait dengan warga negara (Usman, 2015). Hak ini tidak hanya terbatas pada hubungan horizontal yaitu antara warga negara dan negara, namun juga banyak terkait dengan hubungan vertikal yaitu masyarakat dan pengambil keputusan utama (Kurniawan, 2016).

Pengambilan kebijakan pemerintah tidak akan efektif jika masyarakat dari latar belakang sosial dan pendidikan yang berbeda tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan (Mansuri dan Vijayendra, 2013). Terutama mereka yang berkepentingan langsung dengan pembangunan nasional dan daerah. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui perwakilan kelompok lembaga atau organisasi. Partisipasi kolektif masyarakat akan mendorong implementasi kebijakan pemerintah secara optimal (Pelenc, Bazile dan Ceruti,



OPEN GOVERNMENT DAN OPEN DATA

A. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah model pemerintahan dengan memberikan pelayanan publik yang terbuka, partisipatif, dan inovatif kepada masyarakat. Di Indonesia, komitmen pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik untuk masyarakat yang lebih terbuka, partisipatif, dan inovatif diwujudkan dalam gerakan *Open Government Indonesia* (OGI). Saat ini optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi melalui *e-Government* di Indonesia sedang dilakukan secara masif. Keberadaan *e-Government* memfasilitasi interaksi yang terjadi antara pemerintah, masyarakat dan pihak berwenang, sehingga mendorong penerapan *e-government* (Laurati, 2018). Ada juga kebutuhan mendesak untuk melibatkan masyarakat sipil dan pelaku usaha untuk mengidentifikasi praktik-praktik efektif dan pendekatan inovatif dalam memanfaatkan teknologi guna memberdayakan masyarakat dan mendorong transparansi dalam pemerintahan. Peningkatan akses terhadap teknologi juga perlu ditingkatkan oleh pejabat pemerintah dan masyarakat umum. Kita tidak boleh lupa bahwa teknologi adalah pelengkap, bukan pengganti informasi yang jelas dan berguna.

Pemerintahan digital “mengacu pada penggunaan teknologi digital, sebagai bagian dari strategi modernisasi pemerintahan, untuk menciptakan nilai publik. Hal ini bergantung pada ekosistem pemerintahan digital yang



SMART GOVERNMENT: TREN E-GOVERNMENT MASA DEPAN

A. PENDAHULUAN

E-Government (juga dikenal sebagai pemerintahan elektronik, pemerintahan digital, pemerintahan online atau pemerintahan satu atap, yang saat ini mulai berkembang ke mal pelayanan publik) dalam definisi yang paling sempit, menggambarkan penggunaan teknologi Internet untuk mereformasi interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Namun, dalam definisi yang lebih luas, hal ini melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK, komunikasi satelit, dan sistem informasi geografis), selain penggunaan Internet, World Wide Web, dan telepon seluler untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat dan bisnis (Gronlund dan Horan, 2005).

Menurut Al-Obthani dan Ameen (2018), *smart government* dapat memberikan banyak layanan kepada masyarakat, misalnya layanan untuk:

1. Kesehatan
2. Pendidikan
3. Keamanan
4. Pengajuan klaim dan melaporkan masalah
5. Permintaan informasi
6. Penjadwalan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. et al. (2006) *'The motivations for change towards e-government adoption: Case studies from Saudi Arabia'*, in *E-government Workshop*, pp. 1–21.
- Affan, (2004). Kebijakan Pengembangan *E-Government* Di Departemen Dalam Negeri. Makalah. Kendari: Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara.
- Ahab, P. (2015) Strategi Pemerintah Mendorong dan Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan di NTT - Kompasiana.com, Kompasiana. Available at: <https://www.kompasiana.com/peterahab/550d55de8133116c2cb1e368/strategi-pemerintah-mendorong-dan-meningkatkan-partisipasi-masyarakat-desa-dalam-pembangunan-di-ntt> (Accessed: 30 March 2020).
- Al-kaabi, R. (2010). *Critical Success Factors of e-Government: A proposal model for e-Government implementation in Kingdom of Bahrain. Proceedings of the 6th International Conference on E-Government*, 1–9.
- Attard, 2015. *A systematic review of open government data initiatives, 4th ed. Australian Government*, D. T. A., 2018. Digital Transformation Strategy 2018—
2025. Canberra: *Digital Transformation Agency*. Available at: <https://publicadministration.un.org/en/research/un-e-government-surveys> [Accessed 22 April 2020].
- Bouty, A. A., Koniyo, M. H. and Novian, D. (2019) 'Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menggunakan *E-Government* Maturity Model (Kasus di Pemerintah Kota Gorontalo)', *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 23(1). doi: 10.33299/jpkop.23.1.1758.
- Burke, James. Ewan, J. (1999) *Sonoran Preserve Master Plan An Open Space Plan for the Phoenix Sonoran Desert*.

- Campo, Salvatore S and P. Sundaram. (2002). *To Serve and to Preserve: Improving Public Administration in A Competitive World*. New York: Sean Development Bank.
- Darmanto, M. (2016) 'Smart Government: Berdamai dengan Perubahan', Jurnal Borneo Administrator.
- Denhard, Janet V dan Robert B Denhard. (2003). *The New Public Service: Serving not Steering*. Armonk. New York: M.E. Sharpe.
- Dhevina, I. (2018) *E- Government: Inovasi dalam Strategi Komunikasi*, www.setneg.go.id. Available at: https://www.setneg.go.id/baca/index/e_government_inovasi_dalam_strategi_komunikasi (Accessed: 31 March 2020).
- Dirpolkom, 2020. Reviu Implementasi *Open Government* Indonesia. DocPlayer. URL <https://docplayer.info/32821761-Reviu-implementasi-open-government-indonesia.html>
- Doddy, 2017. Memahami Konsep *Open Government* Di Indonesia. URL <http://doddyfisipupr.blogspot.com/2017/09/memahami-konsep-open-government-di.html>
- Dwiyanto, Agus (2005). Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ebrahim, Z. and Irani, Z. (2005) '*E-government adoption: Architecture and barriers*', *Business Process Management Journal*, 11(5), pp. 589–611. doi: 10.1108/14637150510619902.
- Febrianingsih, 2012. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 1, 257–275.
- Gaventa, J. (2002) 'Exploring Citizenship, Participation and Accountability', *IDS Bulletin*, 33(2), pp. 1–14. doi: 10.1111/j.1759-5436.2002.tb00020.x.
- Habibullah, Ahmad. (2010). Kajian Pengembangan dan Pemanfaatan *E-Government*. Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik. Volume 23. Nomor 3. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Handayani, P. W. and Kardia, N. P. (2010) '*Analisis Tingkat Implementasi E-Government Pada Level Kementerian Indonesia Berdasarkan Framework Deloitte & Touche*', *Journal of Information Systems*, 6(2), pp. 134–139.

- Harrison, T. M. et al. (2012) *'Open government and e-government: Democratic challenges from a public value perspective'*, *Information Polity*. IOS Press, 17, pp. 83–97. doi: 10.3233/IP-2012-0269.
- Hermawan, D. and Hutagalung, S. S. (2017) *'Membangun Partisipasi Publik Berbasis Perilaku: Studi Kasus di Provinsi Lampung'*, in Seminar Nasional Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Informasi yang Beretika dan Demokratis. FH FISIP Universitas Terbuka.
- Hius, J. J. (2020) *"Smart Governance sebagai unsur penting implementasi Smart City dari Policy Maker."* Tersedia pada: https://www1-media.acehprov.go.id/uploads/Jurnalis_-_Smart_Governance.pdf.
- Hwang, J., & Syamsuddin, I. (2008). *Failure of e-government implementation: A case study of South Sulawesi. Proceedings - 3rd International Conference on Convergence and Hybrid Information Technology*, ICCIT 2008, 2, 952–960. <https://doi.org/10.1109/ICCIT.2008.400>
- Idrus, I. A., & Zakiyah, U. (2017). Kajian Sukses Implementasi *E-Government*. *JURNAL OF GOVERNMENT - JOG* (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah), 2, 120–134.
- Indrajit, R. E. (2004) *'STRATEGI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI DIGITAL'*. Yogyakarta: Andi.
- Indrajit, Richardus Eko. (2011). *Peranan Teknologi Informasi dan Internet*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Innegartina, 2015. *Open Government Data*. URL <https://innegartina.staff.telkomuniversity.ac.id/open-government-data/>
- Instruksi Presiden (2003) Instruksi Presiden nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Irawan, B. (2013) *'Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik'*, *Jurnal Paradigma*, 2(1), p. 28. Available at: [e-journals.unmul.ac.id › index.php › JParadigma › article › download](http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JParadigma/article/download).
- James, G. (2000) *'Empowering bureaucrats'*, *MC Technology Marketing Intelligence*. Proquest ABI/INFORM, 20(12), p. 62.
- Kadir, Abdul dan Tera CH Triwahyuni. (2013). *Pengantar Teknologi Informasi*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Kadir, Abdul. (2014). *Pengenalan Sistem Informasi*. Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta
- Kharisma, B. and Purnomo, E. P. (2018) 'Implementasi Penerapan *E-Government* Dalam Strategi', *Researchgate*, (December).
- Khristtianto, W. (2007) '*E-GOVERNMENT: STAGES MODEL, MODEL KEMITRAAN DAN KESIAPAN ORGANISASI (Suatu Kajian Awal)*', *Jurnal ADMINISTRATIO*, 136(1), pp. 23–42.
- Krina, 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kurniawan, J. (2016) *Transformasi Partisipasi Publik dalam Perumusan Kebijakandi Era Reformasi*. Available at: <https://setkab.go.id/transformasi-partisipasi-publik-dalam-perumusan-kebijakan-di-era-reformasi/> (Accessed: 28 March 2020).
- Laksono, B. (2017) *Pengawasan Berbasis Partisipasi Publik*. Available at: <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/amatan/pengawasan-berbasis-partisipasi-publik> (Accessed: 28 March 2020).
- Laurati, 2018. *Laporan Penelitian Open Government Mengkaji Penggunaan E-Government Pemerintah Daerah di Indonesia*. Prakarsa. URL <http://theprakarsa.org/laporan-penelitian-open-government-mengkaji-penggunaan-e-government-pemerintah-daerah-di-indonesia/>
- Lucas, Henry J. (2000). *Analisa, Desain dan Implementasi Sistem Informasi*. Edisi Ketiga. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mansuri, G. and Vijayendra, R. (2013) *Localizing Development Does Particpation Work?*, The World Bank. Washington, D.C: The World Bank. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
- Mantikayan, J. M. and Abdulgani, Mo. A. (2017) '*Conceptualizing E-government Readiness of the Philippine Using Different Stages Model*', *CCSPC R&D Journal*, 1(4).
- Mariana, D. (2015) '*Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Daerah*', *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), pp. 216–229. doi: 10.37378/jd.2012.2.163-177.
- Martin. E. (1999). *Managing Information Technology What Managers Need To Know. Third Edition*. New Jersey: Pearson Education International.
- Mc. Keown. Patrick G. (2001). *Information Technology and The Networked Economy*. Harcourt: Orlando.

- Means, G., Schneider, D. M. and Foreword By-Schiro, J. J. (2000) *Metacapitalism: The e-business revolution and the design of 21st-century companies and markets*. John Wiley & Sons, Inc.
- Misuraca. (2007). *Menggagas Implementasi E-Government*. Edisi Terjemahan. Jakarta: Dwi Aksara.
- Muftikhali, Q. E. and Susanto, T. D. (2017) 'Kumpulan Model Maturity *E-Government*: Sebuah Ulasan Sistematis', *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 4(4), p. 311. doi: 10.25126/jtiik.201744367.
- Mulawati, 2019. *Menuju Pemerintahan Terbuka (Open Government) Melalui Penerapan E-Government. Reserach Gate*.
- Muluk, M. R. K. (2007) *Menggugat partisipasi publik dalam pemerintahan daerah: sebuah kajian administrasi publik dengan pendekatan berpikir sistem*. Kerjasama antara Lembaga Penerbitan & Dokumentasi, FIA, UNIBRAW dan Bayumedia.
- Mustopadijaya, AR. (2003). *Sistem Administrasi Negara kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Napitupulu, D. (2014) '*The Critical Success Factors Study for e-Government Implementation*', *International Journal of Computer Applications*, 89(16), pp. 23–32. doi: 10.5120/15716-4588.
- Napitupulu, D. (2015). *Kajian Faktor Sukses Implementasi E-Government, Studi Kasus: Pemerintah Kota Bogor*. *Sisfo*, 05(03). <https://doi.org/10.24089/j.sisfo.2015.03.009>
- Nathanegara (2019) *E-Budgeting untuk Efisiensi dan Minimalisir Kecurangan Halaman*. Available at: <https://www.kompasiana.com/ajinatha/5dbc64ce097f365b873df272/e-budgeting-transparansi-dan-good-governance?page=2>.
- Ndou, V. (2004) '*E-Government for developing countries: opportunities and challenges*', *The electronic journal of information systems in developing countries*. *Wiley Online Library*, 18(1), pp. 1–24.
- Nelson, N. and Wright, S. (1995) *Power and Participatory Development*. Practical Action Publishing. doi: doi:10.3362/9781780445649.
- Nugraha, J. T. (2018). *E-Government Dan Pelayanan Publik E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman*. *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 2(1), 32–42.

- <http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/komunikasi/article/download/758/547>
- O'Brien, James. (2008). Pengantar Sistem Informasi. Jakarta: Salemba Empat.
- OGI, 2014. Inhu Satu-satunya Kabupaten di Indonesia Sampaikan Pemaparan Riau Terkini. URL <http://blog.lapor.go.id/index.php/90-pemberitaan-media/229-inhu-satu-satunya-kabupaten-di-indonesia-sampaikan-pemaparan>
- Pelenc, J., Bazile, D. and Ceruti, C. (2015) 'Collective Capability and Collective Agency for Sustainability: A Case Study', *Ecological Economics*. Elsevier B.V., 118, pp. 226–239. doi: 10.1016/j.ecolecon.2015.07.001.
- Permenpan & RB (2011) Permenpan dan RB No 6 Tahun 2011 - Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah. Available at: <https://www.menpan.go.id/site/tatalaksana/dasar-hukum6>.
- Petrov, O. (2014) "Open Data as a Key Enabler of Smart Government," in *The 17th National Conference on e-Governance*.
- Pirannejad, A. (2011) 'The effect of ICT on political development: a qualitative study of Iran', *Information Development*, 27(3), pp. 186–195. doi: 10.1177/0266666911414386.
- Putra, M. T. (2016) 'Evaluasi Partisipasi Masyarakat dalam E-Government Pelayanan Publik di Kabupaten Boyolali', *Jurnal Publik*, 4(1).
- Rachman, T. and Napitupulu, D. (2018) 'User acceptance analysis of potato expert system application based on TAM approach', *International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology*, 8(1). doi: 10.18517/ijaseit.8.1.3858.
- Ramzi (2020) Mencegah Penyelewengan dengan E-Budgeting - Berita | Portal Bappeda Aceh. Available at: <https://bappeda.acehprov.go.id/berita/detail/125-laput-mencegah-penyelewengan-dengan-e-budgeting> (Accessed: 23 April 2020).
- Retnowati, 2019. Prinsip-Prinsip *Open Government Data* Studi Kasus Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia. LPPM Inst. Teknologi. Telkom Purwok.
- Rianto, Budi., Tri Lestari. (2012). Polri dan Aplikasi E-Government Dalam Pelayanan Publik. Surabaya: CV Putra Media Nusantara (PMN).
- Rowley, C. et al. (2009) 'Electronic-Marketplaces And Their Evolving Benefits Over Time Part 1: Market Types and Research Questions', (July).

- Sabarno, 2007. Memandu otonomi daerah menjaga kesatuan bangsa: untaian pemikiran otonomi daerah, 1st ed. Sinar Grafika.
- Septiani, M. (2020) Strategi Mewujudkan Transparansi dan Partisipasi dalam Pelayanan Publik. Available at: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-strategi-mewujudkan-transparansi-dan-partisipasi-dalam-pelayanan-publik> (Accessed: 29 March 2020).
- Silalahi, M., Napitupulu, D. and Patria, G. (2015) 'Kajian Konsep dan Kondisi *E-Government* di Indonesia', *Jupiter*, 1(1).
- Supangkat, S. H. and Negara, I. (2006) 'Framework Strategi Implementasi *E-Government*', *Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia*, pp. 3–4.
- Susena, E. and Lestari, D. A. (2016) 'Efektivitas Penerapan *Electronic Government* Terhadap Pelayanan Publik Di Kabupaten Sragen', *Jurnal SAINSTECH Politeknik Indonusa Surakarta*.
- Sutabri, Tata. (2004). *Analisa Sistem Informasi*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sutarman. (2009). *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sutrisno, B. and Akbar, I. (2018) 'E-partisipasi Dalam Pembangunan Lokal (Studi Implementasi Smart City Di Kota Bandung)', *Sosioteknologi*, 17(2), pp. 191–207. doi: 10.5614/sostek.itbj.2018.17.2.2.
- Syahri, M. (2013) 'Bentuk – Bentuk Partisipasi Warga Negara Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Berdasarkan Konsep Green Moral Di Kabupaten Blitar', *Jurnal Penelitian Pendidikan UPI*, 13(2), p. 139185.
- Twizeyimana, J. D. and Andersson, A. (2019) 'The public value of *E-Government – A literature review*', *Government Information Quarterly*, 36(2), pp. 167–178. doi: 10.1016/j.giq.2019.01.001.
- UN ASPA (2000) *Benchmarking E-Government*. Available at: <https://publicadministration.un.org/en/research/un-e-government-surveys>.
- United Nation Development Project. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: United Nation Programme.
- Usman, Y. (2015) Partisipasi Publik untuk Kebijakan Yang Lebih Baik, *Kompasiana.com*. Available at: <https://www.kompasiana.com/yusdi.usman/54f9231ea33311af068b47>

- b4/ partisipasi-publik-untuk-kebijakan-yang-lebih-baik (Accessed: 25 March 2020).
- Wang, J. and Zeng, T. (2009) 'Citizen-centered *E-Government* strategy governance framework: case of China', in 2009 International Conference on Web Information Systems and Mining. IEEE, pp. 589–593.
- World Bank (2012) *Definition of E-Government*. Available at: <https://www.worldbank.org/en/search?q=e-government>.
- Wrihatnolo, Randi R dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, (2007). *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta: Elekmedia Komputindo.
- Yildiz, M. (2007) '*E-government research: Reviewing the literature, limitations, and ways forward*', *Government Information Quarterly*, 24(3), pp. 646–665. doi: 10.1016/j.giq.2007.01.002.

PROFIL PENULIS

Sadar, S.IP., M.IP.



Penulis lulus S1 di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar (FISIP UNISMUH) tahun 2017, lulus S2 di Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (MIP UMY) tahun 2019. Saat ini penulis sebagai dosen tetap Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Selain menjadi dosen, juga diamanahi menjabat sebagai Kepala Laboratorium Politik dan Kebijakan Publik FISIPOL UMPR. Dalam profesi sebagai dosen, penulis aktif melakukan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, selain itu juga aktif melakukan kegiatan-kegiatan sebagai Kepala Laboratorium seperti survei kepuasan pelayanan publik dll.

E-GOVERNMENT

(KONSEP, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI E-GOVERNMENT DI INDONESIA)

Menghadapi tantangan global terutama pada dewasa ini yaitu era industri 4.0, menjadikan setiap lembaga baik lembaga pemerintah ataupun lembaga swasta harus mengadopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebab jika tidak maka tentu akan tertinggal jauh ke belakang. Difusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan internet sangat memberikan berbagai kemudahan dan kenyamanan dalam berbagai konteks misalnya pada bidang perdagangan, bidang pendidikan, bidang sosial, dan lain-lain.

Kesuksesan TIK dan Internet yang mampu merubah proses bisnis dalam konteks perdagangan (komersial) seperti *e-commerce* menjadi lebih efektif dan efisien, ternyata sudah meningkatkan ekspektasi masyarakat karena TIK juga dapat diadopsi oleh pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang efektif dan efisien pula. Secara umum, *e-Government* didefinisikan sebagai pemanfaatan TIK dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, atau pemerintahan yang berbasis elektronik. Dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pemerintah. *E-Government* sebagai “penggunaan TIK oleh institusi pemerintah (seperti WAN, internet, *mobile computing*) yang memiliki kemampuan untuk mengubah hubungan dengan masyarakat, bisnis, dan pihak yang terkait dengan pemerintah”.



Penerbit
widina
www.penerbitwidina.com

ISBN 978-623-459-763-9



9 786234 597639